



# RENCANA KERJA (RENJA) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

JL. LETJEND M.T. HARYONO NO 2 TELP. (0741) 61606 FAX. (0741) 62317

PROVIDING SERVICES FOR GOOD GOVERNANCE

# Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Melaksanakan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun berkenaan. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dengan semangat dan tekad yang kuat Inspektorat Daerah Provinsi Jambi akan mewujudkan apa yang menjadi Tujuan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel Partisipatif* yang berorientasi pada Pelayanan Publik. Pada prinsipnya Rencana Kerja ini disusun dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah banyak membawa hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai sarana panduan agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Jambi, 2 Februari 2022

  
INSPEKTUR,  
*Agus Herianto*

H. AGUS HERIANTO, SH.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

# Daftar Isi

---

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II EVALUASI RENJA OPD 2021 - 2026 .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD 2016-2021 .....	8
2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan sebelumnya .....	19
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022.....	21
2.4 Analis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan tahun 2021.....	30
2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	37
2.6 Permasalahan Yang Dihadapi.....	40
2.7 Hambatan dan Kendala.....	43
2.8 Upaya Pemecahan Masalah.....	44
2.9 Tantangan dan Peluang.....	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	47
3.2 Program dan Kegiatan.....	50
BAB IV PENUTUP .....	59

## LAMPIRAN :

Lampiran 1 Evaluasi renja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021

Lampiran 2 Matriks Renstra 2021-2026

Lampiran 3 Renja SIPD Tahun 2022

# Daftar Tabel

---

Tabel 2.1	Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra .....	8
Tabel 2.1.1	Rekapitulasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tahun 2006-2021 (Kondisi Per 31 Desember 2021) .....	11
Tabel 2.1.2	Rekapitulasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2021 .....	15
Tabel 2.1.3	Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018-2021 .....	16
Tabel 2.2	Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Pada Renstra sebelumnya Tahun 2021 -2016 .....	19
Tabel 2.3	Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2022.....	21
Tabel 2.5	Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi .....	37
Tabel 2.9	Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2023 .....	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang Ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi .....	48
Tabel 3.2	Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah .....	52
Tabel 3.2.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 .....	55

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dalam hierarkinya rencana pembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan pembangunan jangka pendek termuat dalam dokumen RKPD yang memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah selamat setahun yang diperoleh dari Rencana Kerja (Renja) OPD sehingga menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan penyusunan rencana dan program kerja merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan itu sendiri agar bersinergi dan sinkron dalam penyusunan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2022 telah beedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menyusun Renja Inspektorat dengan mempedomani JMD Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, Pasal 4 adalah Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pertolongan oleh perangkat daerah..

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi memiliki fungsi, antara lain :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan kenegaraan merupakan harapan semua pihak. Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparasi dan akuntabilitas. sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan perwujudan dari *Good Governance*, dengan memerlukan pengembangan dan penerapan system perencanaan yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah Jambi. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian anggaran untuk dilaksanakan, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Inspektorat daerah Provinsi Jambi perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan program pengawasan dan konsulting harus dimantapkan secara berkelanjutan melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini dituangkan melalui beberapa peraturan perundang –undangan, antara lain:

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah;
8. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (JMN) 2015-2019;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen perencanaan tahun mendatang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25/2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala OPD untuk menyiapkan Renstra OPD, keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah teilih dengan JMD dan Renstra OPD, Pokok-pokok isi dokumen Renstra OPD, Status hukum Renstra OPD. Renstra OPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Renja OPD;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan utama penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah :

- a. Untuk Menjabarkan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan beedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis;

- b. Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah (JMD tahun 2021-2026);
- c. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan;
- d. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil kegiatan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian Renja OPD dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : Evaluasi Renja OPD**

##### **1.1 Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **1.2 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.3 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

##### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

##### **1.5 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : Evaluasi Renja OPD Tahun 2016-2021**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021**

Berisikan rumusan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan atas Keberhasilan sasaran Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Renstra OPD.

### **2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan sebelumnya**

Berisikan pencapaian realisasi kinerja OPD pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya.

### **2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022**

Berisikan upaya yang telah dilakukan OPD dalam mencapai Target Kinerja OPD di tahun 2022.

### **2.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Tahun 2021**

Berisikan upaya yang telah dilakukan OPD dalam mencapai Target Kinerja OPD di tahun 2021.

### **2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berisikan Strategi dan arah kebijakan OPD yang diselaraskan dengan program pembangunan nasional dan kepala daerah teilih.

### **2.6 Permasalahan Yang Dihadapi**

Berisikan masalah-masalah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah OPD di tahun 2022.

### **2.7 Hambatan dan Kendala**

Berisikan masalah OPD dalam mencapai target kinerja di tahun 2022.

### **2.8 Upaya Pemecahan Masalah**

Berisikan strategi OPD dalam mengambil kebijakan dimasa akan datang di tahun 2022.

### **2.9 Tantangan dan Peluang**

Berisikan rencana yang diambil OPD dimasa akan datang di tahun 2022.

## **BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD yang diselaraskan dengan program nasional dan kepala daerah teilih.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

## **BAB IV : Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

# BAB 2

## EVALUASI RENJA OPD

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD 2016-2021

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2021 telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya melalui program dan kegiatan pembangunan. Keberhasilan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2021	TARGET KINERJA 2021 (Renstra)	CAPAIAN KINERJA 2021	Ket
1	2	3	4	5	6 = (4:5) * 100%	6
I	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1 Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	100%	100%	Tercapai
		2 Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	98%	64,31%	65,61%	Tidak Tercapai
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.	1 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai " B " 2 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai " B "	70% 45%	93% 81,82%	132% 181,82%	Tercapai Tercapai
III	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1 Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	64%	82%	128%	Tercapai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI KINERJA 2021	TARGET KINERJA 2021 (Renstra)	CAPAIAN KINERJA 2021	Ket
1	2	3		4	5	6 = (4:5) * 100%	6
IV	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1	Percentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan	92%	62,89%	68,35%	Tidak Tercapai
		2	Percentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan	100%	84,06%	84,06%	Tidak Tercapai
		3	Percentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan	96%	46,21%	48,14%	Tidak Tercapai
V	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	Percentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat	86%	164%	190%	Tercapai
VI	Meningkatnya Kuailtas Pelayanan Publik, Akuntabilitas, Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,92	83,47	104,44%	Tercapai
		2	Nilai AKIP	62	80,51	129,85%	Tercapai
		3	Laporan Keuangan sesuai SAP	100%	100%	100%	Tercapai

Adapun analisis atas capaian kinerja di atas, yaitu :

### 1) Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP

Pada indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP, terlihat pada tabel 1 bahwa capaian Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP tahun 2019 di Provinsi Jambi terealisasi 100 % sesuai dengan target.

Upaya meningkatkan laporan keuangan SKPD sesuai dengan SAP di 43 SKPD Pemerintah Provinsi Jambi dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Pendampingan dan Asistensi, melalui beberapa kegiatan yakni kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, kegiatan pendampingan dan asistensi.

### 2) Indikator Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi

Rekomendasi nilai temuan keuangan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi dari tahun 2003 s.d tahun 2020 sebesar 204.310.961.147,65 yang bisa ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sebesar 135.011.176.359,08 atau sebesar 64,31%.

Upaya meningkatkan penyelesaian nilai temuan keuangan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi ini dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Pendampingan dan Asistensi, melalui beberapa kegiatan yakni kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu, kegiatan pendampingan dan asistensi.

**3) Indikator Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B"**

Untuk realisasi kinerja tahun 2021 diperoleh melalui Laporan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. SKPD yang memiliki nilai minimal B sebanyak 40 (empat puluh) SKPD dan 3 (tiga) OPD memperoleh nilai "CC", sehingga realisasi sebesar 93%. Upaya meningkatkan hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B" dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

**4) Indikator Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B"**

Indikator capaian kinerja Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B" dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Realisasi Kinerja tahun 2021 dihitung berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh KEMENPAN RB tahun 2020, Kabupaten/Kota yang memiliki nilai minimal "B" sebanyak 9 (Sembilan) Kabupaten/Kota dan sebanyak 2 (dua) Kabupaten yang yang memperoleh nilai "CC" sehingga realisasinya 81,82%

Upaya meningkatkan hasil hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B" dilakukan melalui melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

## **5). Indikator Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)".**

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi" dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk menghitung realisasi kinerja tahun 2021. Hasil penilaian EKPPD diperoleh berdasarkan Laporan Hasil penilaian EKPPD Kab/Kota Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut dikarenakan atas proses evaluasi EKPPD Kab/Kota Tahun 2021 belum dilaksanakan dan hasil evaluasi EKPPD Tahun 2019 dan 2020 s.d saat ini belum keluar hasil penilaianya.

Nilai EKPPD Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Jambi Tahun 2018 bahwa terdapat 9 (sembilan) Kab/Kota yang memperoleh hasil evaluasi sama dengan dan lebih dari 'B', dengan realisasi 82%.

Upaya meningkatkan hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B" dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

## **6). Indikator Persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan**

Rekomendasi Temuan BPK RI dari tahun 2006 s.d Desember 2021 sebanyak 1834 rekomendasi, temuan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 1159 atau sebesar 62,89, temuan yang belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 485 atau sebesar 26,31%.

**Tabel 2.1.1**  
**Rekapitulasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi**  
**Tahun 2006-2021 (Kondisi Per 31 Desember 2021)**

No	Objek Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				S	BS	BD	TT
1	2	3	4	5	6	7	8
	TAHUN 2006	45	89	86	3	0	0
1	Pemeriksaan LKPD TA 2005	22	50	49	1	0	0

2	Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Provinsi Jambi	8	9	9	0	0	0
3	General Audit BPD Jambi Tahun Buku 2005	15	30	28	2	0	0
	TAHUN 2007	57	139	136	3	0	0
4	Pemeriksaan LKPD TA 2006	17	52	51	1	0	0
5	Pemeriksaan Bantuan Paol TA 2006	3	6	6	0	0	0
6	Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Penggunaan Dana Bantuan ADB pada Inspektorat Provinsi Jambi TA 2007	3	3	3	0	0	0
7	Pemeriksaan atas Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007	4	11	11	0	0	0
8	Pemeriksaan Operasional BPD Jambi Tahun Buku 2006 dan 2007	14	30	30	0	0	0
9	Pemeriksaan atas Belanja Provinsi Jambi TA 2007	16	37	35	2	0	0
	TAHUN 2008	88	224	219	5	0	0
10	Pemeriksaan LKPD TA 2007	28	72	70	2	0	0
11	Pemeriksaan Pendapatan TA 2008	13	27	27	0	0	0
12	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Raden Mattaher TA 2007	19	70	68	2	0	0
13	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (APBN dan APBD) TA 2007 dan 2008 (Semester I)	16	26	26	0	0	0
14	Pemeriksaan Portofolio dan Operasional Keuangan Bank Jambi TA 2008	12	29	28	1	0	0
	TAHUN 2009	43	101	99	2	0	0
15	Pemeriksaan LKPD Provinsi Jambi TA 2008	14	44	43	1	0	0
16	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2009	7	28	27	1	0	0
17	Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas TA 2008 dan Semester I TA 2009	22	29	29	0	0	0
	TAHUN 2010	55	126	110	16	0	0
18	Pemeriksaan LKPD TA 2009	28	64	62	2	0	0
19	Penggunaan Dana STAR SDP pada Inspektorat Provinsi Jambi	3	5	5	0	0	0
20	Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2010	3	7	6	1	0	0
21	Pelaksanaan Kerja Sama Kontrak Produksi Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Jambisapta Manungaal Pratama Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Jambi Tepian Ratu Riverview Hotel & Resort	3	5	3	2	0	0
22	Pemeriksaan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2010 pada KPU, Panwaslu dan Instansi Terkait Lainnya se-Provinsi Jambi	8	16	6	10	0	0

23	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelayanan Farmasi, Pemeliharaan Peralatan, dan Rekam Medik dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Paripurna Teadu Bermutu pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	10	29	28	1	0	0
	TAHUN 2011	47	113	88	25	0	0
24	Pemeriksaan LKPD 2010	21	56	45	11	0	0
25	Pemeriksaan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2010	4	7	6	1	0	0
26	Pemeriksaan Atas Pendapatan Daerah TA 2010 dan Semester I TA 2011	8	24	21	3	0	0
27	Pemeriksaan Atas Operasional Bank Tahun 2010 dan 2011 (s.d. 30 Juni 2011) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	8	17	15	2	0	0
28	Pemeriksaan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada PT JII dan PT SPP di Jambi	6	9	1	8	0	0
	TAHUN 2012	40	81	58	23	0	0
29	Pemeriksaan LKPD 2011	21	41	29	12	0	0
30	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2012 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4	11	9	2	0	0
31	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Program Jamkesmas dan Jamkesmasda pada Kementerian Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan TA 2010 s.d. Semester I TA 2012 pada Pemerintah Provinsi Jambi	15	29	20	9	0	0
	TAHUN 2013	76	214	147	26	41	0
32	Pemeriksaan LKPD TA 2012	27	82	60	18	4	0
33	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Manajemen RSUD Raden Mattaher TA 2013	19	49	41	7	1	0
34	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2013 pada Pemerintah Provinsi Jambi	8	18	14	1	3	0
35	Pemeriksaan atas Operasional PT BPD Jambi Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III)	10	21	21	0	0	0
36	Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Kegiatan dan Reviu LK oleh APIP TA 2012 dan Sem I TA 2013	12	44	11	0	33	0
	TAHUN 2014	25	54	35	13	6	0
37	Pemeriksaan LKPD TA 2013	19	42	25	11	6	0
38	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2014 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	10	2	0	0
	TAHUN 2015	53	108	34	43	31	0
39	Pemeriksaan LKPD TA 2014	19	46	14	21	11	0
40	Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2014 dan Semester I TA 2015	8	20	7	6	7	0

41	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III 2015)	6	10	0	0	10	0
42	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Belanja Daerah TA 2015 pada Pemerintah Provinsi Jambi	10	20	13	6	1	0
43	Efisiensi Dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Daerah Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	10	12	0	10	2	0
	TAHUN 2016	52	137	36	42	59	0
44	Pemeriksaan LKPD TA 2015	17	50	29	15	6	0
45	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pada Provinsi Jambi TA 2016	8	27	5	16	6	0
46	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Pada Provinsi Jambi TA 2016	7	14	2	11	1	0
47	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 Sampai dengan 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi	9	24	0	0	24	0
48	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jambi	11	22	0	0	22	0
	TAHUN 2017	23	56	31	18	7	0
49	Pemeriksaan LKPD TA 2016	17	44	23	16	5	0
50	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2017 pada Pemerintah Provinsi Jambi	6	12	8	2	2	0
	TAHUN 2018	19	55	18	32	5	0
51	Pemeriksaan LKPD TA 2017	14	43	15	28	0	0
52	PDTT Belanja Daerah Provinsi Jambi TA 2018	5	12	3	4	5	0
	TAHUN 2019	41	110	9	60	41	0
53	Pemeriksaan LKPD TA 2018	26	71	2	28	41	0
54	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 – 2018	12	30	3	27	0	0
55	PDTT Belanja Modal Infrastruktur 2019	3	9	4	5	0	0
	TAHUN 2020	37	104	23	81	0	0
56	Pemeriksaan LKPD TA 2019	11	28	5	23	0	0
57	Pemeriksaan Kinerja Efektifitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Intansi Terkait Lainnya (bulan Desember 2020)	9	24	1	23	0	0
58	Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jambi(bulan Desember 2020)	17	52	17	35	0	0

	TAHUN 2021	49	123	30	93	0	0
59	Pemeriksaan LKPD TA 2020	42	98	21	77	0	0
60	Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Samsat TA 2020	7	25	9	16	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>750</b>	<b>1843</b>	<b>1159</b>	<b>485</b>	<b>190</b>	<b>0</b>

Sumber Data : Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan

Upaya meningkatkan persentase tindaklanjut BPK yang dapat diselesaikan ini dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

#### 7). Indikator Persentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan

Rekomendasi Temuan Irjend sampai dengan Desember 2021 sebanyak 69 (enam puluh Sembilan) rekomendasi, temuan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 58 (lima puluh delapan) rekomendasi atau sebesar 84,06%, dan sebanyak 11 (sebelas) rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti atau sebesar 18,96%.

**Tabel 2.1.2**  
Rekapitulasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TLHP			
				S	BS	BD	TPTD
1	2019	22	36	36	0	0	0
2	2021	14	33	22	11	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>36</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber Data : Inspektorat Jenderal Kemendagri RI

Upaya meningkatkan Persentase rekomendasi Itjend yang dapat diselesaikan ini dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

#### 8). Indikator Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan

Rekomendasi Temuan Inspektorat sampai dengan Desember 2021 sebanyak 766 rekomendasi, temuan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 354

rekomendasi atau sebesar 46,21%. dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebesar 308 rekomendasi atau 40,20%.

**Tabel 2.1.3**  
**Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**  
**Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Selesai	Dalam Proses	Blm Di TL
1	2018	77	120	93	0	27
2	2019	71	112	48	0	64
3	2020	192	323	105	1	217
4	2021	96	211	108	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>436</b>	<b>766</b>	<b>354</b>	<b>1</b>	<b>308</b>

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Upaya meningkatkan Persentase rekomendasi Itprov yang dapat diselesaikan ini dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan pada kegiatan pelaksanaan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.

**9). Indikator Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat**

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat Tahun 2020 dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2021

Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2021 adalah sebanyak 74 orang

- 2) Hitung Jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2020

Adapun jumlah aparatur pengawasan bersertifikat tahun 2020 adalah sebanyak 59 orang

- 3) Hitung persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2021, dengan formula :

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2021 = ((Jumlah aparatur pengawas bersertifikat

tahun 2021 – jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2020) :  
Jumlah aparatur pengawas bersertifikat tahun 2020) x 100%

Maka,

Persentase peningkatan jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat tahun 2021 =  $((74 - 59) : 59) \times 100\% = 25,42\%$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja : (Realisasi Kinerja : Target Kinerja) x 100%

Capaian Kinerja : (164% : 86%) x 100%

Capaian Kinerja : 190%

Upaya meningkatkan Persentase jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat ini dilakukan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

#### **10) Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pada indikator indeks kepuasan masyarakat bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 di Provinsi Jambi dari target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 79,92, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan yaitu :

- a) persyaratan pelayanan;
- b) prosedur pelayanan;
- c) waktu pelayanan;
- d) biaya/tarif pelayanan;
- e) produk/hasil pelayanan;
- f) kemampuan petugas pelayanan;
- g) perilaku petugas pelayanan;
- h) kualitas sarana dan prasarana;
- i) penanganan pengaduan pelayanan;

diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Provinsi Jambi sebesar 83,47 dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 76,61-88,30.

Upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi ini dilakukan melalui program yaitu:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- b) Program Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

#### **11) Indikator Nilai AKIP**

Pada tahun 2021 target nilai AKIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah 80,51 tercapai 129,85%.

#### **12) Indikator Laporan Keuangan sesuai SAP**

Pada tahun 2022 Capaian Kinerja atas Laporan Keuangan sesuai SAP tahun 2021 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Adapun capaian kinerja atas Laporan Keuangan sesuai SAP tahun 2021 sebesar 100%.

## 2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan sebelumnya.

Tabel 2.2

Capaian Indikator kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Renstra sebelumnya

Tahun 2016 s.d 2021 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI												CAPAIAN HINGGA 31 DES 2021
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		
			T	R	T	R	T	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	- Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		- Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov Jambi	75%	75%	82%	82%	88%	82%	92%	55,46%	92%	55,46%	98%	64,31%	64,31%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B"	61%	13%	63%	9%	65%	7%	67%	23,25%	67%	86%	70%	93%	93%
		- Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kab/Kota dengan nilai "B"	9%	0%	18%	0%	27%	36%	36%	73%	36%	73%	45%	81,82%	81,82%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI												CAPAIAN HINGGA 31 DES 2021	
			2016		2017		2018		2019		2020		2021			
			T	R	T	R	T	T	T	R	T	R	T	T		
3.	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	- Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi"	27%	91%	36%	100 %	45%	100%	55%	82%	55%	82%	64%	82%	82%	
4.	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional.	Percentase Tindak Lanjut Selesai :  - BPK - Itjend Kemendagri - Inspektorat Daerah Provinsi	82%	80%	85%	79%	87%	75%	90%	70,08%	90%	75%	92%	62,89%	62,89%	
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	- Persentase peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	44%	44%	70%	70%	80%	80%	86%	86%	86%	131%	86%	164%	164%	

### 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022

Tabel 2.3 Evaluasi Renja Inspektorat daerah Provinsi Jambi Triwulan II Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
						K	.	K	.				
1	2	3	4	5		6		7		11 = 6+7		12 = 11/5*100	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	BB Indeks	25.768.206.063	10,95%	4.503.143.174	44,1%	11.363.613.630	61,57%	15.866.756.804	17,14%	61,57%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	20 Dokumen	1.336.309.946	0	107.089.178	9,2%	123.311.178	17,24%	230.400.356	3 Dokumen	17,24%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	3 Dokumen	1.201.310.092	8,51%	102.225.860	9,6%	115.447.860	18,12%	217.673.720	2 Dokumen	18,12%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	17 Dokumen	134.999.854	3,60%	4.863.318	5,8%	7.863.318	9,43%	12.726.636	1 Dokumen	9,43%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	16.965.911.011	16,30%	3.106.526.532	47,5%	8.064.463.577	65,84%	11.170.990.109	25%	65,84%

RENCANA KERJA 2023

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi | 21

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)			
					I		II			K			
					K	.	K	.		K	.	K	
1	2	3	4	5	6	.	7	.	11 = 6+7	12 = 11/5*100			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	14 Bulan	16.965.911.011	18,31%	3.106.526.532	47,5%	8.064.463.577	65,84%	11.170.990.109	98 orang/triwulan	65,84%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	2.917.273.632	20,81%	607.017.000	34,0%	991.982.500	54,81%	1.598.999.500	20,81%	54,81%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00	-	0,0%	-	0	-	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	2.917.273.632	20,81%	607.017.000	34,0%	991.982.500	54,81%	1.598.999.500	14 Orang	54,81%
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00	-	0,0%	-	0	-	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0%	-	0,00	-	0,0%	-	0	-	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.787.638.252	0,00%	402.613.989	53,9%	963.716.282	76,43%	1.366.330.271	24,09%	76,43%

## RENCANA KERJA 2023

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi | 22

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
						I		II					
				K	.	K	.	K	.	K	.	K	.
1	2	3	4	5		6		7		11 = 6+7		12 = 11/5*100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	35.087.545	0	-	31,3%	10.991.464	0,3132583	10.991.464	0	0,31325828
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	138.955.000	23,98%		33.316.996	35,3%	49.064.596	59,29%	82.381.592	6 Paket 59,29%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	116.142.200	0,37%		425.000	21,2%	24.605.656	21,55%	25.030.656	0 21,55%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	25.927.920	0	-	3,9%	1.005.000	0,0387613	1.005.000	0	0,038761304
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	1.382.495.469	26,68%		368.871.993	61,6%	851.531.293	88,28%	1.220.403.286	133 Laporan 88,28%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100%	-	0,00	-	0,0%	-	0	-	0	0

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
					I		II					
					K	.	K	.	K	.	K	.
1	2	3	4	5	6	.	7	.	11 = 6+7		12 = 11/5*100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100% 944.524.888	0,21%	3.960.000 69,4%	655.809.558 69,85%	659.769.558 69,85%	0	69,85%	0	69,85%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	0 -	0	- 0,0%	- 0	- 0	0	- 0	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	125 Unit 944.524.888	0,42%	3.960.000 69,4%	655.809.558 69,85%	659.769.558 69,85%	0	69,85%	0	69,85%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100% 880.861.334	20,08%	152.551.276 38,3%	337.650.437 55,65%	490.201.713 25%	43.516.222 25%	55,65%	3 Laporan	60,87%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Penyediaan Surat Menyurat yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100% 71.490.220	20,78%	14.853.500 40,1%	28.662.722 60,87%	43.516.222 60,87%	43.516.222 3 Laporan	60,87%	3 Laporan	60,87%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100% 229.957.170	20,57%	47.298.776 39,2%	90.176.988 59,78%	137.475.764 59,78%	137.475.764 3 Laporan	59,78%	3 Laporan	59,78%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100% 18.120.000	23,65%	4.285.000 57,5%	10.425.000 81,18%	14.710.000 81,18%	14.710.000 3 Laporan	81,18%	3 Laporan	81,18%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)		
					I		II			K		
					K	.	K	.		K	.	K
1	2	3	4	5	6	.	7	.	11 = 6+7	12 = 11/5*100	.	.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100% 561.293.944	15,34%	86.114.000	37,1%	208.385.727	52,47%	294.499.727	3 Laporan	52,47%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terelihara	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	100% 935.687.000	14,38%	123.385.199	24,2%	226.680.098	37,41%	350.065.297	12%	37,41%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang teelihara dan dibayarkan Pajaknya.	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	4 unit 303.260.000	16,16%	49.008.999	26,9%	81.547.043	43,05%	130.556.042	1 unit	43,05%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/Lapangan yang teelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya.	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	7 unit 153.710.000	24,45%	37.589.200	52,1%	80.107.759	76,57%	117.696.959	4 unit	76,57%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainya yang dipelihara	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	103 unit 177.377.800	11,44%	20.287.000	17,2%	30.467.000	28,61%	50.754.000	12 unit	28,61%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Meningkatkan Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	3 unit 301.339.200	5,48%	16.500.000	11,5%	34.558.296	16,94%	51.058.296	0	16,94%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
						K	.	I	.	II			
1	2	3	4	5	6	7		11 = 6+7	12 = 11/5*100				
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan sesuai PKPT	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	67%	7.053.214.837	8,43%	878.740.239	43,4%	3.063.864.781	55,90%	3.942.605.020	61,32%	55,90%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	67%	5.737.551.680	20,07%	516.948.808	30,3%	1.737.018.418	39,28%	2.253.967.226	23,32%	39,28%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	70%	1.742.043.560	1,9%	33.031.156	13,8%	240.278.756	15,69%	273.309.912	2 Laporan	15,69%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	70%	861.310.060	2,1%	17.763.356	16,1%	138.667.556	18,16%	156.430.912	2 Laporan	18,16%
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	146.038.000	51,9%	75.798.050	71,1%	103.848.050	123,01%	179.646.100	10 Laporan	123,01%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)		
					K	.	K	.		K	.	
				5	6	7	11 = 6+7	12 = 11/5*100				
1	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	289.208.000	36,7%	106.032.606	67,7%	195.732.606	104,34%	301.765.212	25 Laporan 104,34%
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	70%	1.723.046.860	1,6%	27.839.556	34,0%	586.333.406	35,64%	614.172.962	1 Laporan 35,64%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	75%	975.905.200	26,3%	256.484.084	48,4%	472.158.044	74,66%	728.642.128	40 Dokumen 74,66%
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	67%	1.315.663.157	17,7%	361.791.431	46,8%	616.182.599	74,33%	977.974.030	38% 74,33%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian tuntutan kerugian negara/daerah yang ditangani	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	249.379.545	0,84%	2.082.356	0,8%	2.082.356	1,67%	4.164.712	0 1,67%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)	
						I		II					
				K	.	K	.	K	.	K	.	K	.
1	2	3	4	5		6		7		11 = 6+7		12 = 11/5*100	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	100%	1.066.283.612	33,73%	359.709.075	57,6%	614.100.243	91,33%	973.809.318	8 Laporan	91,33%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Percentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks Reformasi Birokrasi Katagori "B"	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel		3.178.579.100	20,71%	812.990.050	41,7%	1.326.846.363	67,32%	2.139.836.413	27,78%	67,32%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitasi Pengawasan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	7 Peraturan	457.426.400	0,00	-	1,5%	6.840.000	0,0149532	6.840.000	0	1,50%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	7 Peraturan	457.426.400	0	-	1,5%	6.840.000	0,0149532	6.840.000	0	1,50%
	Pendampingan dan Asistensi	Percentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	80%	2.721.152.700	41,42%	812.990.050	48,5%	1.320.006.363	78,39%	2.132.996.413	55,55%	78,39%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Sasaran	Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022(%)			
					I		II			K			
					K	.	K	.		K	.		
1	2	3	4	5	6	.	7	.	11 = 6+7	12 = 11/5*100	.		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	42 OPD	259.059.300	79,7%	206.440.500	79,7%	206.440.500	159,38%	412.881.000	43 Perangkat Daerah	159,38%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	42 OPD	191.523.660	28,7%	54.900.000	34,3%	65.604.912	62,92%	120.504.912	20 Perangkat Daerah	62,92%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	75 Kegiatan	2.043.164.880	23,2%	474.070.550	47,2%	963.921.300	70,38%	1.437.991.850	11 Kegiatan	70,38%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	2 OPD	227.404.860	34,1%	77.579.000	37,0%	84.039.651	71,07%	161.618.651	1 Perangkat Daerah	71,07%
					36.000.000.000		6.194.873.463		15.754.324.774		21.949.198.237		
Percentase Serapan Anggaran per Juni 2022										43,8%			

## **2.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan Tahun 2021**

**Sasaran I : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

### **1. Indikator Kinerja : Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP**

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP adalah sebesar 100%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 100%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Keuangan di 43 OPD.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD secara intens
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan di 43 (empat puluh tiga) OPD sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)

### **2. Indikator Kinerja : Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi**

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke Kas Daerah sesuai hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov-Jambi adalah sebesar 64,31%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 98%. Hal tersebut karena pelaksanakan rekomendasi yang terlambat ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

**Sasaran II : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**

1. Indikator Kinerja : Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B adalah sebesar 93%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 70%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan SAKIP di 43 (empat puluh tiga) OPD.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD secara intens.
  - 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SAKIP di 43 (empat puluh tiga) OPD sesuai dengan Permenpan Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP.
- 
2. Indikator Kinerja : Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B"

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B" adalah sebesar 81,82%, telah mencapai

target yang diinginkan sebesar 45%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan SAKIP di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Biro Organisasi Setda Kabupaten/Kota secara intens
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan SAKIP di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi melalui Biro Organisasi Setda di masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

### **Sasaran III : MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH KAB/KOTA DI PROVINSI JAMBI**

Indikator Kinerja : Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi”.

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Kab/Kota dengan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal “Sangat Tinggi” adalah sebesar 82%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 64%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan Biro Pemerintahan Otda Setda Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi secara intens.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Dokumen LPPD di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi melalui Biro Pemerintah Otda Setda di masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

#### **Sasaran IV : MENINGKATNYA PENYELESAIAN TLHP APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL**

##### **1. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah sebesar 62,89%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 92%. Hal tersebut karena pelaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

##### **2. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri**

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri adalah sebesar 84,06%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 100%. Hal tersebut karena pelaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

### 3. Indikator Kinerja : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi adalah sebesar 46,21%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 96%. Hal tersebut karena pelaksanaan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindaklanjut

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut dengan OPD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.

- 3) Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

#### **Sasaran V : MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS**

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang Bersertifikat adalah sebesar 164%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 86%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP dan Kemendagri secara intens terhadap jadwal pendidikan dan pelatihan APIP selama masa pandemi covid-19.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan BKN Regional IV dan BKD Provinsi Jambi dalam penangkatan Inpassing Auditor dan P2UPD di lingkup Inspektorat Provinsi Jambi.
- 3) Menyediakan Fasilitas Pembelajaran dengan *Sistem Daring* dan *Luring* untuk pemeriksa APIP Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

#### **Sasaran VI : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

1. Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi atas Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 83,47 telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 79,92. Hal tersebut

karena salah satu Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai *Providing Service For A Good Governance*.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan pengaduan dengan media telepon, internet, surat kabar, foto
- 2) Memberikan pelatihan dan asistensi sesuai dengan kebutuhan kegiatan dimasing-masing OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
- 3) Menerima konsultasi masyarakat di bidang pengawasan.

## 2. Indikator Kinerja : Nilai AKIP

Realisasi atas Indikator kinerja Nilai AKIP adalah sebesar 80,51, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 62 Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan AKIP Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi secara intens.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan AKIP Provinsi Jambi kepada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.

## 3. Indikator Kinerja : Laporan Keuangan sesuai SAP

Realisasi atas Indikator kinerja Laporan Keuangan sesuai SAP adalah sebesar 100%, telah mencapai target dari yang diinginkan sebesar 100%. Hal tersebut karena Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan Asistensi dan Pendampingan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi Jambi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2021 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi secara intens.
- 2) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Pengelolan BMD Setda Provinsi Jambi secara intens.
- 3) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

## 2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Table 2.5**  
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>VISI : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT, (MANTAP)</b>				
<b>MISI : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan</b>				
1.	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan aparatur	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	pengawas yang professional dan berintegritas.			
		Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif.
			Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah; b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar; c. Survei Prespektif Corruption.
			Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah; b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah.
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi; b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas; c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi;

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja.
		Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah
		Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.		Melaksanakan Koordinasi dan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Peningkatan peran APIP memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah		a. Assurance Activities b. Consulting/Advisory Activities c. Anti Corruption Activities
		Peningkatan mutu pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi		a. Implementasi rencana aksi ( <i>action plan</i> ) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan
		Penerapan manajemen PNS		a. Menyusun peta kompetensi SDM b. Pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)

Sumber Data : Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021 - 2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

## 2.6 Permasalahan Yang Dihadapi

Dalam upaya menciptakan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik Tahun 2021 terdapat hambatan dan permasalahan yang secara langsung tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan namun secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan dan kendala tersebut antara lain :

### 1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut atas seluruh kegiatan pengawasan intern. Berdasarkan daftar rekapitulasi TLHP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai tahun 2021, diketahui jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah 5.982 rekomendasi, dengan rincian:

- Selesai ditindaklanjuti sebanyak 5.345 rekomendasi (89,35%);
- Dalam Proses tindaklanjut sebanyak 82 rekomendasi (1,37%); dan
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 555 rekomendasi (9,28%).

### 2. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jambi

Salah satu komitmen pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN adalah dengan membangun sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif sesuai dengan amanat Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada :

- Pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- Pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
  - 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi Nomor LAP/05/PW05/3/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal laporan hasil *Quality Assurance* (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Jambi berada pada level “Terdefinisi” dengan nilai maturitas SPIP sebesar 3,000 (level 3).

Pada tingkat “Terdefinisi” berarti pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern belum didukung dokumentasi yang memadai. Dengan adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan menunjukkan indikator bahwa SPIP belum sepenuhnya diterapkan/diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan tugas bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah.

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagian auditan masih rendah terutama terkait pelaksanaan kegiatan utama Perangkat Daerah (*core business*) belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan efisien

4. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Dari hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah pada tahun 2020, masih terdapat 3 (tiga) perangkat daerah dengan nilai “CC”, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman beberapa perangkat daerah terhadap penerapan SAKIP.

## 5. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Belum Optimalnya peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*, sebagaimana diketahui terkait perubahan paradigma APIP dari *watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaannya masih belum sesuai harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *Consulting Partner*.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/101/M/A.A.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 disimpulkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2020 masih berada pada kategori “B” dengan nilai “62,32”. Tingkatan pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut menunjukkan kategori B dengan predikat cukup baik yang mempunyai interpretasi bahwa penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. Disamping itu, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya peran APIP sebagai *quality assurance and consulting* masih belum optimal. Atas hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, maka hal yang perlu disempurnakan terkait tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yaitu mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*. *Quality Assurance* dan *Consulting* diharapkan bukan hanya terkait dengan keuangan, tetapi juga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kinerja setiap Perangkat Daerah.

## 6. Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia pemerintahan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai di sektor publik dari aspek fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian atau

pengawasan. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sampai dengan saat ini belum memadai dari segi kuantitas dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks dan dengan adanya penambahan Inspektur Pembantu IV dan Inspektur Pembantu Khusus berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sehingga diperlukan APIP yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Saat ini terdapat Pejabat Fungsional Auditor 30 (tiga puluh) orang dan Pejabat Fungsional PPUPD 44 (empat puluh empat) orang dengan jumlah objek pemeriksaan sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit kerja dan 11 (sebelas) kabupaten/kota, sehingga terdapat keterbatasan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan baik itu pengawasan atas kinerja seluruh Perangkat Daerah maupun untuk menangani kasus-kasus pengaduan dari Pemerintah dan Gubernur.

- b. Standar kompetensi profesional SDM Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi.

Masih kurangnya APIP yang belum memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

## 2.7 Hambatan dan Kendala

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 antara lain masih terbatasnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang yang profesional, kompeten dan berintegritas sehingga proses koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan belum maksimal baik secara intern di dalam lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dan ektern di dalam lingkup Inspektorat dengan SKPD, Obrik, dan Masyarakat.

## **2.8 Upaya Pemecahan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

1. Melakukan Pembinaan Pengawasan terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga terjadi peningkatan intensitas pengawasan SKPD di Lingkup Provinsi Jambi;
2. Melakukan Assistensi dan Pendampingan SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan cara Mendorong SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja;
3. Melaksanakan Supervisi terhadap Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Peningkatan dan Penguatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Memfasilitasi SKPD dalam Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional secara berkala dalam Mendorong SKPD agar segera menyelesaikan rekomensi TLHP Aparat Pengawasan Fungsional;
5. Mengirimkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk mengikuti Diklat Teknis Pengawasan dan Diklat Non Teknis Lainnya sehingga tercapai Peningkatan Sumber Daya Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang lebih berkualitas.

## **2.9 Tantangan dan Peluang**

### **1. Tantangan (*challenge*)**

#### **1) Penerapan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi**

Pelaksanaan pengawasan saat ini belum berbasis aplikasi sehingga pelaksanaan pengawasan masih dilakukan secara manual dengan meminta *hardcopy* pada auditi serta pengumpulan dan penataan Data Base Pengawasan dilakukan secara manual.

Dalam rangka melaksanakan Misi Gubernur Jambi untuk Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-goverment* yang terintegrasi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan harus didukung dengan aplikasi sistem pengawasan yang terintegrasi.

## **2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya kebaikan tatakelola pemerintahan. Tatakelola pemerintah yang baik adalah prasyarat utama pembangunan. Kualitas tatakelola pemerintahan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan semakin baik tatakelola pemerintahan suatu daerah semakin cepat pula pembangunan. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga terwujudnya transparansi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, bersih, dan melayani.

## **3) Meningkatkan Sinergitas APIP dengan APH**

Dalam melakukan koordinasi penanganan laporan dan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel diperlukan peningkatan Sinergitas Kerjasama antara APIP dan APH.

## **4) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Memastikan APIP memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP yang kompeten dan profesional.

## **2. Peluang (*Opportunity*)**

- 1) Terdapatnya peraturan perundangan-undangan tentang:
  - Perencanaan pengawasan
  - Reformasi birokrasi
- 2) MOU Sinergitas kerjasama APIP dan APH
- 3) Tersedianya lembaga-lembaga pendidikan APIP yang profesional
- 4) Adanya komitmen yang tinggi dari Gubernur tentang Pentingnya Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Adapun perencanaan pembinaan dan pengawasan pada Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi selama 8 tahun dari tahun 2016 s/d 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 2.9**  
**Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan 2016 s.d 2023**

No.	OBRIK	TAHUN								JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	SKPD	45	43	43	43	43	43	43	43	344
2.	KASUS	21	34	34	16	16	16	16	16	169
3.	KAB/KOTA	11	11	11	11	11	11	11	11	88
JUMLAH		77	88	88	70	70	70	70	70	70

Sedangkan untuk tahun 2023 direncanakan pembinaan dan pengawasan pada lingkup Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 70 obrik binaan pengawasan, yaitu :

- a) 43 SKPD
- b) 11 Kasus
- c) 11 Kabupaten/Kota

# BAB 3

## TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana Kerja yang disingkat Renja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang disusun untuk satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, dimana untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 disusun masih mengacu pada JMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2021.

Untuk mendukung misi Gubernur Jambi “memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung oleh e-goverment yang terintegrasi”, dengan tujuan “mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel dengan pelayanan publik berkualitas”. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, maka Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sesuai tugas dan fungsinya maka tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah “mewujudkan tata kelola Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas.”

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi**

NO (1)	TUJUAN (2)	INDIKATOR TUJUAN (3)	SASARAN (4)	INDIKATOR SASARAN (5)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	2024 (9)	2025 (10)	2026 (11)
	<i>Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang profesional dan berintegritas.</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan</i>			1.6	1.8	2.1	2.2	2.3	2.5
			1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Percentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklajuti	89,35%	90,00%	90,50%	91,00%	91,50%	92,00%
				Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
				Percentase penilaian Perangkat Daerah yang beredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	N/A	60%	65%	70%	75%	80%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B"	93,02 %	95%	97%	98%	99%	100%
			2. Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
			.	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	N/A	3	3	3	4	4
				Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	10%	15%	20%	25%	30%	35%

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Tahun 2021 – 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang meliputi :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.  
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah Pembayaran Gaji dan tunjangan.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Persentasi Jumlah aparatur pengawasan yang bersertifikat dan telah mengikuti diklat pengawasan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator kinerja ini yaitu Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah pengadaan barang Milik daerah.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kinerja kegiatan ini yaitu Jumlah barang milik daerah yang teelihara

## **2. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Laporan Hasil Pengawasan Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus dan Klarifikasi Kasus,Persentase Penyelesaian Tuntutan Ganti Keruugian Daerah Laporan Perkembangan Hasil Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar Rekomendasi Hasil Pengawasan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Laporan Hasil Pengawasan.

## **3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program ini yaitu sebagai berikut :

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengawasan dan Hasil Fasilitasi Pengawasan.

b. Pendampingan dan Asistensi

Indikator kinerja Kegiatan yaitu Persentase Pelaksanaan Pendampingan Asistensi.

**Tabel 3.2**  
Perumusan sasaran, strategi dan arah kebijakan misi I sesuai fungsi Inspektorat Daerah di 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembagunan Daerah
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklajuti	90,50%	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar c. Survei Perspektif Corruption	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
				Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis,

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembagunan Daerah
					c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	Pendampingan dan Asistensi - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Persentase penilaian Perangkat Daerah yang beredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	65 %	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B".	97 %	Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah	- Program Penyelenggaraan Pengawasan - Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi
	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 3	Peningkatan APIP memberikan peran dalam Early Warning System kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	a. Assurance Activities b. Consulting/Advisory Activities c. Anti Corruption Activities	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembagunan Daerah
		Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	3	Peningkatan mutu Pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi</li> <li>b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan</li> </ul>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	Penerapan manajemen PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun profil kompetensi SDM</li> <li>b. Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP.</li> <li>c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP</li> <li>d. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)</li> </ul>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

**Tabel 3.2.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan**  
**Indikatif Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023**

<i>Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</i>		<i>Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</i>		<i>Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Tahun 2021</i>	
		<i>Target</i>	<i>Rp</i>		
<b>URUSAN PENGAWASAN</b>				<b>38.246.520.195,00</b>	
<i>Program Penyelenggaraan Pengawasan</i>		<i>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT</i>		72%	9.181.025.349,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal</i>	72%	8.057.094.157,00	
1)	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	54 Lap	1.853.369.700,00	
2)	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2) <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	40 Lap	1.415.458.100,00	
3)	Reviu Laporan Kinerja	3) <i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>	21 Lap	126.875.000,00	
4)	Reviu Laporan Keuangan	4) <i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>	55 Lap	291.812.500,00	
5)	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota	5) <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/ Kota</i>	21 Lap	2.726.696.000,00	
6)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6) <i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	155 Dok	1.642.882.857,00	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<i>Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	100%	1.123.931.192,00	
1)	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1) <i>Jumlah Laporan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Negara/Daerah yang ditangani</i>	2 Lap	82.616.290,00	
2)	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2) <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>	19 Lap	1.041.314.902,00	
<i>Program Perumusan Kebijakan Teknis, Pendampingan dan Asistensi</i>		<i>Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"</i>	38%	3.512.915.000,00	
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan</i>	17	629.300.000,00	
1)	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1) <i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun</i>	17	629.300.000,00	

2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		Percentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	100%	2.883.615.000,00
	1)	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	43 PD	629.300.000,00
	2)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 PD	185.745.000,00
	3)	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3) Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	46 Keg	1.439.270.000,00
	4)	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4) Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 PD	629.300.000,00
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>			<b>Nilai AKIP</b>	<b>B</b>	<b>25.552.579.846,00</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang Selesai dirumuskan	21 Dok	338.908.500,00
	1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	178.640.000,00
	2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	2) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Dok	160.268.500,00
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Percentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	15.817.050.076,00
	1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang	15.817.050.076,00
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Percentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	3.499.984.632,00
	1)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	112.000.000,00
	2)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	3.087.984.632,00
	3)	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undang	250 Orang	150.000.000,00

	4)	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	4)	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan</i>	250 Orang	150.000.000,00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	2.174.505.207,00	
	1)	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	1)	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	32.292.636,00
	2)	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	2)	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	89.804.275,00
	3)	<i>Penyediaan barang logistik kantor</i>	3)	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	28 Paket	175.549.325,00
	4)	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	4)	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket	126.530.306,00
	5)	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	5)	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	12 Dok	26.316.839,00
	6)	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	6)	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	500 Lap	1.474.011.826,00
	7)	<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	7)	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dok	250.000.000,00
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	1.050.000.000,00	
	1)	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan</i>	1)	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	6 Unit	750.000.000,00
	2)	<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	2)	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	7 Unit	300.000.000,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	100%	877.169.297,00	
	1)	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1)	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Lap	66.518.857,00
	2)	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	2)	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Lap	270.786.958,00
	3)	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	3)	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12 Lap	18.391.800,00
	4)	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	4)	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan</i>	12 Lap	521.471.682,00
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Teelihara	100%	1.794.962.134,00	

1)	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	1)	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	10 Unit	156.015.650,00
2)	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	2)	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	21 Unit	307.808.900,00
3)	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	3)	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	170 Unit	178.368.792,00
4)	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	4)	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	4 Unit	1.152.768.792,00

# BAB 4

## P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi selama 1 (satu) tahun mendatang.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 ini disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra Pemerintah Provinsi Jambi sehingga terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis, sekaligus merupakan salah satu dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Provinsi Jambi.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ini dapat menjadi acuan sementara dalam menyusun dokumen perencanaan selanjutnya, baik yang tertuang dalam RKA-KL dan DPA OPD berdasarkan pagu indikatif 2023.

Jambi, 2 ~~Februari~~ 2022

 INSPEKTUR,



H. AGUS HERIANTO, SH.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690818 199703 1 004

# LAMPIRAN



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

## INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Lerjen M. T. Haryono No. 2 Telp. (0741) 61606-Fax. (0741) 62317  
J A M B I - 36122

Jambi, 4 Juli 2022  
Dzul Hijjah 1443 H

Nomor : S-700/ AF /ITPROV-1.1/VII/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Evaluasi Renja Triwulan II  
Tahun Anggaran 2022

Kepada  
Yth. Sekretaris Daerah Prov.Jambi  
Cq. Kepala Bappeda Provinsi  
Jambi  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-1709/Bappeda-2.3/VII/2022 Tanggal 4 Juli 2022 Perihal Permintaan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Evaluasi Renja Triwulan II Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (sebagaimana terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :  
- Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAIRAN PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2022



No	Kode Rencana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra s.d 2022		Realisasi capaian Kinerja Renstra s.d Tahun N-2		Target Kinerja dan Anggaran Ranja Tahun 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Ranja Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Ranja s/d Akhir Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Akhir Tahun 2022 (%)		OPD Penanggung Jawab			
											I		II											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	8.01.01.1.00.00	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Layanan	Jumlah pedang Kantor dan Bangunan Layanan yang diperbaiki/Rahabilitasi	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	4 Unit	Rp. 1.135.732.800			3 unit	Rp. 301.209.200	5.40%	Rp. 16.500.000	11.0%	Rp. 34.558.298	18.94%	Rp. 81.000.298	11 = 7+8+9+10	0	100%	100	Rp. 91.000.298	100%	4%	Inspektorat Provinsi Jambi
2	8.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelempangan Pengawasan internal	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	72%	Rp. 9.046.346.172			87%	Rp. 7.003.214.837	8.43%	Rp. 978.740.239	43.4%	Rp. 3.963.864.797	55.90%	Rp. 3.942.800.028	91.32%	88.80%	88.80%	Rp. 3.942.800.028	17.70%	4%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	72%	Rp. 7.036.023.800			87%	Rp. 5.727.551.860	28.87%	Rp. 616.848.898	10.3%	Rp. 1.737.016.416	39.29%	Rp. 1.353.067.238	23.32%	38.20%	23.32%	Rp. 1.353.067.238	32.30%	20%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Efisiensi Pemerintah Daerah	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	52 Laporan	Rp. 1.825.980.000			70%	Rp. 1.742.043.980	1.0%	Rp. 33.031.158	13.0%	Rp. 240.276.758	15.89%	Rp. 273.360.812	2 Laporan	18.89%	10%	Rp. 273.360.812	8.04%	10%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	38 Laporan	Rp. 1.364.540.000			70%	Rp. 881.310.080	2.1%	Rp. 17.763.356	16.1%	Rp. 135.697.208	16.1%	Rp. 198.436.812	2 Laporan	18.10%	2 Laporan	Rp. 198.436.812	8.12%	11%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.01.03	Revu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Gospa Pemerintah Daerah	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	21 Laporan	Rp. 125.000.000			100%	Rp. 146.038.000	51.0%	Rp. 75.798.050	71.1%	Rp. 103.846.050	123.01%	Rp. 179.846.190	10 Laporan	123.81%	10 Laporan	Rp. 179.846.190	47.62%	54%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.01.04	Revu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	55 Laporan	Rp. 387.800.000			100%	Rp. 289.208.000	36.7%	Rp. 106.032.606	67.7%	Rp. 185.732.608	104.34%	Rp. 301.790.212	25 Laporan	164.34%	25 Laporan	Rp. 301.790.212	45.49%	100%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.01.05	Pengawasan Uraian dan Tetapan Kategori/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Uraian dan Tetapan Kategori/Kota	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	21 Laporan	Rp. 2.886.400.000			70%	Rp. 1.723.048.860	1.0%	Rp. 27.839.556	34.9%	Rp. 586.333.408	35.84%	Rp. 814.172.962	1 Laporan	38.84%	1 Laporan	Rp. 814.172.962	4.70%	25%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tingkat Lanjut Penerapan RSPN-PD	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tingkat Lanjut Penerapan RSPN-PD	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	198 Dokumen	Rp. 1.816.803.800			75%	Rp. 975.905.200	26.3%	Rp. 256.484.084	48.4%	Rp. 472.158.044	74.89%	Rp. 728.842.178	40 Dokumen	74.89%	40 Dokumen	Rp. 728.842.178	25.81%	40%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Terbatas	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Terbatas	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	100%	Rp. 1.107.321.372			67%	Rp. 1.315.683.157	17.7%	Rp. 361.791.431	48.0%	Rp. 816.182.508	74.32%	Rp. 977.874.838	38%	74.32%	0	Rp. 977.874.838	0.00	0%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.02.01	Pengawasan Penyelewangan bentuk Korupsi dan Abusif	Jumlah Laporan penyelewangan bentuk korupsi dan abusif yang dilengkapi	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	2 Laporan	Rp. 81.365.360			100%	Rp. 249.379.540	0.84%	Rp. 2.082.356	0.8%	Rp. 2.082.308	1.67%	Rp. 4.164.712	0	1.67%	0	Rp. 4.164.712	0.00	0%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Terbatas	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Terbatas	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	19 Laporan	Rp. 1.025.926.012			100%	Rp. 1.086.283.612	33.73%	Rp. 359.703.075	67.0%	Rp. 814.100.243	91.03%	Rp. 873.899.318	8 Laporan	91.03%	8 Laporan	Rp. 873.899.318	88.00%	80%	Inspektorat Provinsi Jambi	
3	8.01.03	Program Penerapan Kebijakan, Pendekatan dan Asistensi	Penerapan Kebijakan Daerah yang berorientasi pada Pendekatan dan Asistensi	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	89%	Rp. 3.394.929.000				Rp. 3.178.879.160	20.71%	Rp. 812.950.050	41.7%	Rp. 1.326.946.363	67.32%	Rp. 2.139.836.613	27.73%	67.32%	27.73%	Rp. 2.139.836.613	73.00%	62%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.03.1.01	Penerapan Kebijakan Daerah yang berorientasi pada Pendekatan dan Asistensi	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah yang berorientasi pada Pendekatan dan Asistensi	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	17	Rp. 620.000.000				7 Pendekatan	Rp. 457.426.400	0.00	Rp. -	-1.0%	Rp. 6.840.000	0.0149032	Rp. 9.946.988	0	1.00%	0	Rp. 9.946.988	0.00	1%	Inspektorat Provinsi Jambi
	8.01.03.1.01.01	Penerapan Kebijakan Daerah yang berorientasi pada Pendekatan dan Asistensi	Jumlah Kebijakan Daerah yang berorientasi pada Pendekatan dan Asistensi	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	17 Pendekatan	Rp. 620.000.000				7 Pendekatan	Rp. 457.426.400	0	Rp. -	-1.0%	Rp. 6.840.000	0.0149032	Rp. 6.840.000	0	1.00%	0	Rp. 6.840.000	0.00	1%	
	8.01.03.1.01.02	Pendekatan dan Asistensi	Pendekatan dan Asistensi yang dilengkapi Pendekatan dan Asistensi	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	100%	Rp. 2.776.820.000			80%	Rp. 2.721.152.700	61.62%	Rp. 812.880.000	48.0%	Rp. 1.222.008.363	78.39%	Rp. 2.132.990.413	65.00%	78.39%	55.56%	Rp. 2.132.990.413	55.56%	77%	Inspektorat Provinsi Jambi	
	8.01.03.1.02.01	Pendekatan dan Asistensi yang dilengkapi Pendekatan dan Asistensi	Jumlah Pendekatan Daerah yang dilengkapi Pendekatan dan Asistensi	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	43 Pendekatan	Rp. 526.000.000				42 OPO	Rp. 259.059.300	79.7%	Rp. 208.440.500	79.7%	Rp. 412.891.000	43 Pendekatan	169.39%	43 Pendekatan	Rp. 412.891.000	102%	70%	Inspektorat Provinsi Jambi		
	8.01.03.1.02.02	Pendekatan, Asistensi, Verifikasi, dan Pendekatan Referensi Sistem	Jumlah Pendekatan Daerah yang dilengkapi Pendekatan, Asistensi, Verifikasi, dan Pendekatan Referensi Sistem	TingkatcapaianTataKelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Amanat dan Kependidikan	43 Pendekatan	Rp. 183.000.000				42 OPO	Rp. 191.523.800	28.7%	Rp. 54.800.000	34.3%	Rp. 85.804.912	62.82%	Rp. 120.804.872	20 Pendekatan	62.82%	20 Pendekatan	Rp. 120.804.872	45.51%	60%	Inspektorat Provinsi Jambi





Wacana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Institusi  
Tabel 6.1  
Tanggung Jawab Daerah Pemerintah Jambi Tahun 2021-2026

BENSTRA TAHUN 2021-2026



Tahun	Indikator Tujuan	Indikator Risiko Sumber	Program, Rangkaian Risiko dan Relevansi Kinerja Fungsional (Layanan)	Risiko/Risiko Pada Unit Kinerja Fungsional (Layanan)	Target Rp. 2.372.200.000 100%	Target Rp. 2.372.200.000 100%	Target Rencana Pengeluaran dan Ketercapaian Perekiraaan		Bantuan Rp. 2.372.200.000 100%
							Target Rp. 2.372.200.000 100%	Target Rp. 2.372.200.000 100%	
1. Tahun	5. Pengembangan Inovasi Teknologi Informasi dan Aplikasi Digital dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	5. Pengembangan Inovasi Teknologi Informasi dan Aplikasi Digital dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	5. Pengembangan Inovasi Teknologi Informasi dan Aplikasi Digital dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	5. Pengembangan Inovasi Teknologi Informasi dan Aplikasi Digital dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	7.079.400.000 100%	7.079.400.000 100%	7.079.400.000 100%	7.079.400.000 100%	2.372.200.000 100%
2. Tahun	6. Implementasi Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	6. Implementasi Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	6. Implementasi Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	6. Implementasi Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	2.372.200.000 100%
3. Tahun	7. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	7. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	7. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	7. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	2.372.200.000 100%
4. Tahun	8. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	8. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	8. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	8. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	2.372.200.000 100%
5. Tahun	9. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	9. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	9. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	9. Pengembangan Rancangan Kinerja Fungsional Layanan dengan Tujuan Spesifik dalam Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kinerja Fungsional Layanan	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	7.473.813.800 100%	2.372.200.000 100%



WHISTRA THIHN 2021-2026



RENSTRA TAHUN 2021-2026



RENSTRA TAHUN 2021-2026



**RENSTRATAHUN 2021-2026**



RENSTRA TAHUN 2021-2026



DESENTRALIZACIÓN 2021-2026



No.	Indikator Tujuan	Kunci Kegiatan	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Kunci Kinerja Publik Admin.	Target Rp.	Rp. Diperoleh	Tabel 3		Tabel 4		Rincian Biaya
								Target	Rp. Diperoleh	Target	Rp. Diperoleh	
1	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000,-
2	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000,-
3	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000,-
4	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	Penyelesaian Perselisihan Antara Pihak Yang Bertemu Dalam Perdagangan Maupun Lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000,-

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Provinsi Jambi**  
**Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>														
6 01	INSPEKTORAT DAERAH								38,246,520,195				37,562,834,913	
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								25,552,579,846				24,805,424,860	
6 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								338,908,500				340,603,043	
6 01 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	4 Dokumen	21 Dokumen	178,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	179,533,200
6 01 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang selesai dirumuskan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	17 Laporan	21 Dokumen	160,268,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	161,069,843
6 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,817,050,076					16,500,000,000
6 01 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	98 Orang/Bulan	100 Persen	15,817,050,076	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	16,500,000,000
6 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								3,499,984,632					3,499,984,632
6 01 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Persentase APIP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Paket	100 Persen	112,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	112,000,000
6 01 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase APIP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	70 Orang	100 Persen	3,087,984,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	3,087,984,632
6 01 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase APIP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	250 Orang	100 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	150,000,000
6 01 01 1.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase APIP yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	250 Orang	100 Persen	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	150,000,000
6 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								2,174,505,207					2,187,877,733

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Jambi  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi**  
**Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target				
6 01 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Paket	100 Persen		32,292,636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	32,454,099
6 01 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Paket	100 Persen		89,804,275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	90,253,296
6 01 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	28 Paket	100 Persen		175,549,325	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	176,427,072
6 01 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Paket	100 Persen		126,530,306	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	127,162,958
6 01 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Dokumen	100 Persen		26,316,839	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	26,448,423
6 01 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	500 Laporan	100 Persen		1,474,011,826	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	1,481,381,885
6 01 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	1 Dokumen	100 Persen		250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	253,750,000
<b>6 01 01 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>													<b>350,000,000</b>	
6 01 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	6 Unit	100 Persen		750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	0
6 01 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	7 Unit	100 Persen		300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	350,000,000
6 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									877,169,297				<b>881,555,143</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Jambi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
6   01   01   1.08   01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Laporan	100 Persen	66,518,857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	66,851,452
6   01   01   1.08   02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Laporan	100 Persen	270,786,958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	272,140,892
6   01   01   1.08   03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Laporan	100 Persen	18,391,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	18,483,759
6   01   01   1.08   04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	12 Laporan	100 Persen	521,471,682	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	524,079,040
6   01   01   1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								1,794,962,134					1,045,404,309
6   01   01   1.09   01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	10 Unit	100 Persen	156,015,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	156,795,728
6   01   01   1.09   02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	21 Unit	100 Persen	307,808,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	309,347,945
6   01   01   1.09   06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	170 Unit	100 Persen	178,368,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	179,260,636
6   01   01   1.09   09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	BB Predikat	4 Unit	100 Persen	1,152,768,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Predikat AKIP Perangkat Daerah	BB Predikat	400,000,000
6   01   02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>								9,181,025,349					9,226,930,478
6   01   02   1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								8,057,094,157					8,097,379,629

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Jambi  
Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi**  
**Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi**

<b>Kode</b>				<b>Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>			<b>Indikator Kinerja</b>			<b>Rencana Tahun 2023</b>						<b>Catatan Penting</b>	<b>Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024</b>		
							<b>Capaian Program</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>	<b>Lokasi Output Kegiatan</b>	<b>Target Capaian Kinerja</b>			<b>Pagu Indikatif (Rp.)</b>	<b>Sumber Dana</b>		<b>Target Capaian Kinerja</b>	<b>Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)</b>	
											<b>Program</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>Hasil Kegiatan</b>				<b>Tolok Ukur</b>	<b>Target</b>	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Persen	54 Laporan	74 Persen	1,853,369,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	74 Persen	1,862,636,549	
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Persen	40 Laporan	74 Persen	1,415,458,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	74 Persen	1,422,535,391	
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Persen	21 Laporan	74 Persen	126,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	74 Persen	127,509,375	
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Persen	55 Laporan	74 Persen	291,812,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	74 Persen	293,271,563	
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Persen	21 Laporan	74 Persen	2,726,696,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	74 Persen	2,740,329,480	
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Persen	155 Dokumen	74 Persen	1,642,882,857	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	74 Persen	1,651,097,271	
6	01	02	1.02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>												1,123,931,192			1,129,550,849
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Persen	2 Laporan	100 Persen	82,616,290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	74 Persen	83,029,372	
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 Persen	19 Laporan	100 Persen	1,041,314,902	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Sesuai PKPT	74 Persen	1,046,521,477	
6	01	03		<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>												3,512,915,000			3,530,479,575
6	01	03	1.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>												629,300,000			632,446,500

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Provinsi Jambi  
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 6.01.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi  
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur		
6 01 03 1.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis yang selesai dirumuskan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Persen	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	629,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	43 Persen	632,446,500
6 01 03 1.02	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>								<b>2,883,615,000</b>				<b>2,898,033,075</b>
6 01 03 1.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Persen	43 Perangkat Daerah	100 Persen	629,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	43 Persen	632,446,500
6 01 03 1.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Persen	43 Perangkat Daerah	100 Persen	185,745,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	43 Persen	186,673,725
6 01 03 1.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Persen	46 Kegiatan	100 Persen	1,439,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	43 Persen	1,446,466,350
6 01 03 1.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD yang diberikan Pendampingan dan Asistensi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 Persen	4 Perangkat Daerah	100 Persen	629,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh indeks reformasi birokrasi kategori "B"	43 Persen	632,446,500
<b>TOTAL</b>								<b>38,246,520,195</b>					<b>37,562,834,913</b>